

## Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo

Debby Ariyanto<sup>1\*</sup>, Sastro M. Wantu<sup>2</sup>, Yanti Aneta<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: debbyariyanto@gmail.com<sup>1</sup>, sastrowantu@ung.ac.id<sup>2</sup>, yantianeta@ung.ac.id<sup>3</sup>

### Artikel info

#### Artikel history:

Diterima : 28-10-2021

Diterima dalam bentuk

revisi : 12-11-2021

Diterima untuk publish :

14-11-2021

**Kata kunci:** implementasi;  
program bantuan tunai non  
pangan; kecamatan kota barat

**Keywords:** implementation;  
non food cash aid program;  
kota barat sub-district

#### Abstrak

Penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Kota Barat dengan rumusan masalah: Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan Program Bantuan Tunai Non Pangan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Metode penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah tujuh orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi data. Hasil penelitian menemukan variabel atau faktor keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan penanaman modal di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Faktor atau variabel yang menentukan implementasi menurut Donald Van Matter dan Carl Van Horn adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Organisasi, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Ternyata semua faktor mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.

#### Abstract

*This research took place in Kota Barat Sub-District with the formulation of the problem: How is the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Kota Barat Sub-District, Gorontalo City ? The aim of this research is to know and explain about the implementation of the Non Food Cash Aid Program in Kota Barat Sub-District, Gorontalo City. The research method is a qualitative. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. The number of informants in this study was seven people. The data analysis technique is data triangulation. The results of research found variables or factors in successful implementation of the development policy of investment in Kota Barat Sub-District, Gorontalo City. Factor or variables that determine the implementation according to Donald Van Matter and Carl Van Horn is Communication, Resources, Disposition, Organizational Structure, and Economic, Social and Political Environment. Apparently all factors effect the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Kota Barat Sub-District, Gorontalo City.*

**Koresponden author: Debby Ariyanto**

Email: debbyariyanto@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



## Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang selalu menjadi persoalan di beberapa negara berkembang. Di Indonesia sendiri, kemiskinan telah lama menjadi persoalan dan sampai dengan saat ini belum menunjukkan tanda-tanda yang baik. Jika di pandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada *gap* antara lemahnya *purchasing power* dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Pada bulan Maret tahun 2018 BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,82%, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95% juta orang ([Statistik](#), 2018).

Mengkaji lebih jauh tentang Indonesia, Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu provinsi hasil pemekaran termuda yang ada di Indonesia juga mengalami masalah di bidang ini. Kota Gorontalo sendiri adalah ibukota Provinsi Gorontalo yang secara resmi ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2001 (UU Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7) ([Indonesia](#), 2007). Secara geografis, Kota Gorontalo memiliki luas wilayah 66,25 km<sup>2</sup> (0,55% dari luas Provinsi Gorontalo) dan berpenduduk sebanyak 180.127 jiwa berdasarkan data SP 2010 dengan tingkat kepadatan penduduk 2.718 jiwa/km<sup>2</sup> yang dikutip dalam ([Holiangu](#), 2014). Berdasarkan data diatas, Kota Gorontalo memiliki karakteristik yang cukup unik jika dibandingkan dengan ibukota provinsi lain.

Sisi pengurangan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, data Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi Gorontalo yang dipublikasikan BPS Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 menuturkan bahwa capaian pembangunan merupakan sumber data utama bagi pemangku kebijakan dalam merencanakan pembangunan.

**Tabel 1. Indikator Kemiskinan di Provinsi Gorontalo**

Indikator Kemiskinan	Perkotaan+Perdesaan					
	2018		2019		2020	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	198.51	188.30	186.03	184.71	185.02	185.31
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	16.81	15.83	15.52	15.31	15.22	15.59
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	316296.00	325129.00	333070.00	353109.00	368990.00	374843.00
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3.06	3.02	2.65	2.61	2.67	2.86
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.75	0.83	0.64	0.56	0.65	0.79

Sumber : (BPS Gorontalo, 2021)

Berkaitan dengan data BPS Provinsi Gorontalo diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 0,52 persen. Penduduk miskin tahun 2018 sebanyak 188.300.000 jiwa dengan persentase 15,8 persen. Tahun 2019 turun menjadi 184.710.000 jiwa dengan persentase 15,5 persen. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2018 di Propinsi Gorontalo sebesar 3,02 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,83. Tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,61 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,56. Apabila jarak antara indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan semakin kecil dapat dikatakan perekonomian stabil ([BPS Gorontalo](#), 2021).

Uraian diatas juga memberikan makna tersirat bahwa peran pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan bantuan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012,

Sebenarnya, telah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menanggulangi masalah kemiskinan, diantaranya Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Penanganan Fakir Miskin, Program Penyediaan Rumah Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin, Korban Bencana dan Dampak Pembangunan Provinsi, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan masih banyak lagi program yang di jalankan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi kemiskinan yang menyedot biaya yang mencapai milyaran rupiah.

Dibidang pangan sendiri, pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bnatuan Pangan Non Tunai (Hidayat, Afifuddin, & Hayat, 2021). Pemberian bantuan ini telah dilakukan serentak sejak 2017 pada 44 kota di Indonesia menarik untuk dianalisis pengimplementasiannya dari berbagai perspektif. Terhitung sejak program tersebut dilaksanakan serentak, Propinsi Gorontalo adalah salah satunya.

BPNT ini sendiri merupakan salah satu program bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di agen (yang ditunjuk oleh salah satu Bank Himbara).

Dibidang pangan sendiri, pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bnatuan Pangan Non Tunai ([Hidayat, Afifuddin, & Hayat, 2021](#)). Pemberian bantuan ini telah dilakukan serentak sejak 2017 pada 44 kota di Indonesia menarik untuk dianalisis pengimplementasiannya dari berbagai perspektif. Terhitung sejak program tersebut dilaksanakan serentak, Provinsi Gorontalo adalah salah satunya. BPNT ini adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di *e-Warong* KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Penyalur.

Jumlah proporsi masyarakat di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang menerima BPNT sekitar 1915 kepala keluarga. Di Kota Gorontalo sendiri pihak pemerintah terkait bekerja sama dengan agen Brilink, sehingga untuk lokasi atau tempat pengambilan bantuan tersebut melalui semua agen/kios Brilink yang ada di seluruh Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Dari data yang dipaparkan oleh Koordinator Daerah Khusus Pangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo menunjukkan bahwa jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang berada di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Banyak hal yang melatarbalakangi hal ini, akan tetapi faktor luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk miskin di kecamatan tersebut merupakan faktor utamanya.

Hal serupa diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dimana pihaknya mengaku bahwa Kecamatan Kota Barat memiliki jumlah penduduk tergolong “miskin” paling banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Gorontalo. Selain itu di kecamatan ini sering terjadi masalah yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan non

tunai. Kasus tumpang tindih data KPM, adanya penerima kartu ganda, hingga opnum agen yang mencari keuntungan pribadi menjadi beberapa masalah yang sering terjadi di Kecamatan Kota Barat ini. Hal ini secara tersurat mengindikasikan proses implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di kecamatan ini masih memerlukan perhatian oleh *stakeholder*.

Selain data observasi diatas, beberapa literatur terdahulu mengenai program BPNT ini menunjukkan hal yang seragam, yakni masih ada kekurangan dalam pengimplementasiannya. Akan tetapi yang paling menjadi perhatian peneliti adalah temuan dari Ishak Fadlurrohimi, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Sri Sulastri (2017) yang menjelaskan keberhasilan BPNT di Kota Cimahi, Jawa Barat. Penelitian kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa penyaluran program telah mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan ([Fadlurrohimi, Nulhaqim, & Sulastri, 2019](#)).

## Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui cara meneliti objek penelitian kemudian mengkaji secara keseluruhan dan mendalam. Penelitian ini juga menggunakan metode *purposive sampling*, dengan menyertakan informan kunci yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Koordinator Daerah Khusus Pangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Selain itu, perwakilan dari Bappeda Kota Gorontalo, Bidang Kesra di Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, serta beberapa masyarakat yang bertindak sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih ([Rahardjo, 2017](#)).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive sampling*, dengan menyertakan informan kunci yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Koordinator Daerah Khusus Pangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman ([Huberman & Miles, 2002](#)) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Faktor Komunikasi

Definisi komunikasi dalam sebuah organisasi adalah proses kompleks. Dalam hal ini seseorang bisa saja menahannya atau bahkan menyebarkanluaskannya. Sedangkan sumber informasi yang berbeda akan memberikan interpretasi yang berbeda pada pihak tertentu. Agar tujuan dari sebuah implementasi dapat berjalan efektif, pihak yang akan bertanggungjawab memberikan keputusan harus tahu apakah mereka (dalam hal ini personil lainnya) dapat merealisasikannya.

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “Analisis Dampak Penerapan Bantuan Pangan Non Tunai Sebagai Pengganti Rastra dan Evaluasi Sistem dan Evaluasi Sistem Pelaksanaannya di Kota Surakarta” yang dilakukan Lisa Kurniawati (2017) menghasilkan

temuan bahwa “jika dilihat dari perspektif perlindungan sosial, implementasi BPNT tidak optimal dikarenakan faktor komunikasi dari hulu ke hilir tidak sinkron sehingga data yang dihasilkan tidak berkualitas”.

Dari penelitian ini, faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan. Berdasarkan bahasan tersebut, Kecamatan Kota Barat sudah terlaksana tetapi tidak maksimal, utamanya disisi waktu penyampaian informasi tentang kebijakan yang akan berlaku. Komunikasi yang terjadi antara pembuat dan implementator kebijakan belum maksimal, sehingga ada kemungkinan untuk terdistorsi dan penyalahgunaan atau penyelewengan tujuan yang hendak di capai oleh kebijakan tersebut.

Harapannya ada sistem atau mekanisme komunikasi yang dibangun antara pembuat kebijakan dan implementator kebijakan, dan mekanisme harus memuat reward dan punishment selanjutnya dilegalkan sehingga jika terjadi penyelewengan akan ada kejelasan sanksinya, sebaliknya jika sesuai dengan mekanisme tersebut maka akan mendapatkan reward. Mekanisme reward dan punishment ditetapkan dalam suatu kebijakan berupa Surat Keputusan pimpinan daerah yang bersangkutan.

## **2. Faktor Sumber Daya**

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “2018. Analisis Korelasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Miskin” yang dilakukan oleh Silvina Maulidina (2018) menghasilkan temuan bahwa “penyaluran program BPNT melalui e-warong sudah cukup efektif dan efisien serta progresif dan sudah potensial dalam pemberdayaan KPM serta sustainable. Tetapi masih perlu pendampingan secara intensif berkelanjutan, pementapan proses bisnis secara komprehensif, dan pembangunan jejaring kerja.”

Mengenai sumber daya, dalam proses penyaluran BPNT itu dapat disimpulkan bahwa ada sedikit kendala di beberapa desa. Seperti contoh yakni Kios Delima yang ada di Kelurahan Lekobalo. Dimana sebagian KPM menitipkan kartu BPNT mereka ke Agen Brilink Kios Delima tersebut. Secara tidak langsung hal tersebut dinyatakan melanggar aturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai agen. Seharusnya agen tersebut melakukan koordinasi dan tidak mengarahkan KPM untuk mencairkan bantuannya kepada selain Agen yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Desa dan Pihak BRI, ini membuktikan bahwa pendamping tersebut telah melanggar aturan yang ada dan tidak mengikuti apa yang tercantum pada Pedoman Umum BPNT.

Berdasarkan komponen dari teori Donald Van Matter dan Carl Van Horn tersebut, maka untuk sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan hasil pantauan penulis dan indepth interview dengan informan penting, sudah dapat dikatakan ideal. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesra di Kelurahan Molosipat W.,

Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang menerangkan bahwa jumlah personil yang terlibat dalam BPNT saat ini sudah sangat pas dan ideal.

Sementara dari sisi sumber daya anggaran, program Bantuan Pangan Non Tunai merujuk pada Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknik BPNT yang menerjemahkan bahwa bantuan sebesar Rp 200.000/ KPM/ bulan ini nantinya langsung masuk ke rekening KPM masing-masing, tanpa ada campur tangan instansi terkait di level bawahnya. Hal ini mengindikasikan hal baik dalam rangka transparansi dan mengurangi adanya ketidakberesan yang diakibatkan oleh oknum-oknum nakal akibat perpanjangan tangan pendistribusian bantuan.

### **3. Faktor Sikap Pelaksana**

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridis di mana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksanaan dalam implementasi kebijakan yaitu pemahaman, respon pelaksana terhadap implementasi dan intensitas dari respon pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo disimpulkan bahwa dukungan ataupun sikap dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah direalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dukungan dari pelaksana ataupun pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM yang ada di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Dalam proses penyaluran BPNT semua pihak ikut serta dalam memantau berjalannya proses penyaluran tersebut, tidak hanya dari Tim Koordinator Daerah dari Dinas Sosial dan Pemerintah setempat saja tetapi juga karang taruna, TNI-AD dalam hal ini adalah BABINSA dan juga dari pihak Kepolisian yakni BINMAS. Semua pihak yang ada dilapangan itu menunjukkan bahwa mereka membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

### **4. Faktor Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia : Analisis Rumah Tangga” yang dilakukan oleh Ayu Setyo Rini dan Lilik Sugiharti (2016) menghasilkan temuan bahwa “pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sejauh ini masih belum ada struktur birokrasi yang memadai, terutama di level yang ada dibawah. Oleh karena itu sangat diperlukan yang namanya pelatihan manajerial serta dukungan sarana dan prasarana serta SOP yang jelas dengan jobdesk masing-masing.”

Sementara pengimplementasian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait, SOP yang tersedia dari hulu ke hilir sudah sangat jelas dan baik, hanya saja masih ada person yang kurang mengenal jobdesk mereka masing-masing. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat keberlangsungan program BPNT di Kecamatan Kota Barat.

Lebih mengkhawatirkan lagi ketika data hasil wawancara dengan Koordinator Daerah Khusus Pangan dari Dinsos Kota Gorontalo yang menerangkan bahwa jumlah pendamping (dalam hal ini Koorda) yang tidak didasarkan pada jumlah penerima KPM

yang diampunya, akan tetapi didasarkan pada demografis. Hal ini secara tiak langsung memberatkan tupoksi koorda yang memiliki area cakupan yang begitu luas apalagi jika kondisi demografisnya berpulau pulau. Sedangkan perihal insentif yang didapatpun dipukul rata. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Sosial seharusnya mempertimbangkan perihal ini, karena struktur birokrasi yang timpang seperti ini pastinya akan mempengaruhi tingkat keefektifan distribusi BPNT.

##### **5. Faktor Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Jika dilihat dari segi sosial masyarakat sangat merespon adanya program BPNT, mereka sangat mendukung dengan adanya program ini. Hal itu dapat dilihat dari respon masyarakat setempat yang tidak mendapatkan program juga ikut membantu dalam proses pencairan bahan. Akan tetapi data yang peneliti dapatkan salah satu informan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo juga menegaskan bahwa secara sosial, BPNT berpengaruh terhadap kondisi psikis masyarakat. Perlu adanya pemahaman yang mumpuni perihal pemberian BPNT ini. Pasalnya yang seharusnya program ini sebagai stimulasi bagi mereka agar bias berkarya lebih baik lagi, tetapi malah menimbulkan kemalasan. Oleh karena itu pihak terkait perlu melakukan edukasi terkait dengan hal ini.

Sedangkan dari sisi ekonomi, program BPNT yang telah diimplementasikan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo ini sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi yang outputnya secara lebih jauh tidak hanya mengentas kemiskinan tetapi juga fokus pada pencegahan stunting. Diharapkan dengan terpenuhinya kecukupan gizi masyarakat, anntinay akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam bekarya lebih baik lagi.

Dan yang terakhir dari segi politik, program BPNT ini terealisasi pastinya dipengaruhi oleh politik yang sedang berjalan saat ini. Hasil menunjukkan bahwa peran politik tidak hanya berkaitan dengan salah satu atau beberapa aspek saja, akan tetapi merasuk pada keseluruhan sendi kehidupan masyarakat. Sehingga jika politik ini berubah, maka secara tidak langsung akan mengubah ekonomi, sosial, keamanan suatu daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketiganya akan saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan.

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan tesis ini, sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan mengenai Kebijakan Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dikaji dari faktor determinan Kebijakan Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo ini, maka dari segi komunikasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Baik melalui whatsapp group antar agen, pendamping, dan juga pihak kepentingan lainnya. Sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran juga sudah dilakukan. Sehingga dapat dikatakan komunikasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di semua pihak sudah berjalan dengan baik. Sementara dalam hal struktur birokrasi, perlu adanya kajian yang nyata dari pemerintah pusat etrkait dengan prosedur koordiantor daerah yang ada. Sehingga tidak

ditentukan berdasarakan cakupan wilayah, tetapi juga diperhatikan jumlah KPM yang ditangani setiap koorda tersebut. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia dan anggaran sudah cukup baik, hanya perlu diperhatikan perihal mutasi SDM internal. Dan yang terakhir dari perspektif lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang menjelaskan bahwa ketiga pastinya selalu berpengaruh terhadap kebijakan BPNT ini.



### Bibliografi

- Amir, F. (2019). *Pelaksanaan Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permen No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah*. Fakultas Hukum Unpas.
- BPS Gorontalo  
<https://gorontalo.bps.go.id/dynamictable/2018/01/12/238/persentasependuduk-miskinp0-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-gorontalo-2017-2020.html>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share: Social Work Journal*, 9(2), 122–129.
- Hidayat, A. S., Afifuddin, A., & Hayat, H. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1647–1654.
- Holiangu, L. (2014). Perancangan Interior Pusat Kecantikan dan Kebugaran di Kota Gorontalo. *Intra*, 2(2), 426–431.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage.
- Indonesia, P. R. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. *Menkumham RI*.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*.
- Statistik, B. P. (2018, 7 16). Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.